



DETERMINAN PENCEGAHAN FRAUD DIMEDIASI OLEH AUDITOR INTERNAL APIP

Adinda Priski Dhea Asiyanti¹, Ihyaul Ulum², Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono³

AFILIASI:

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang

*KORESPONDENSI:

priskiadinda@gmail.com

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v10i4.5078](https://doi.org/10.32534/jpk.v10i4.5078)

CITATION:

Priski Dhea Asiyanti, A. ., Ihyaul Ulum, & Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono. (2023). DETERMINAN PENCEGAHAN FRAUD DIMEDIASI OLEH AUDITOR INTERNAL APIP. Jurnal Proaksi, 10(4), 526–539. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i4.5078>

Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:

3 Desember 2023

Di Review:

13 Desember 2023

Diterima:

31 Desember 2023

Abstrak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang merugikan kepentingan bersama atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu. Fraud biasanya dipicu oleh lemahnya sistem pengendalian dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan mengenai kecurangan ditemukan pada sisa dana rekrutmen fasilitator, serta pertanggungjawaban pelaporan keuangan dana desa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenis pengambilan sampel yaitu probabilitas sampling dengan teknik simple random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data SEM PLS (Partial Least Squares) dengan menggunakan software Smart PLS 3.0. Dari hasil penelitian akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, sedangkan kompetensi perangkat desa dan pengawasan audit internal APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Variabel audit internal APIP sifatnya sebagai partial mediation terhadap variabel akuntabilitas. Sedangkan, terhadap variabel kompetensi variabel audit internal APIP bersifat sebagai full mediation.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Kompetensi, Audit Internal APIP dan Pencegahan Fraud.

Abstract

Law Number 20 of 2001 explains that corruption is an action that harms the common interest or the wider community for the benefit of personal interests and/or certain groups. Fraud is usually triggered by a weak control system and lack of supervision in financial management. Problems regarding fraud have been found in the remaining facilitator recruitment funds, as well as accountability for financial reporting of village funds. Sampling in this study used a type of sampling, namely probability sampling with a simple random sampling technique. The data analysis technique used is SEM PLS (Partial Least Squares) data analysis using Smart PLS 3.0 software. From the results of this research, accountability has no effect on fraud prevention, while village apparatus competency and APIP internal audit supervision have a positive and significant effect on fraud prevention. The APIP internal audit variable is a partial mediation of the accountability variable. Meanwhile, for the competency variable, the APIP internal audit variable is full mediation.

Keywords: *Accountability, Competency, APIP Internal Audit and Fraud Prevention.*

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dipergunakan untuk desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota (Dharmawati et al., 2021). Didalam keuangan desa terdiri dari pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, retribusi dan dana bagi hasil pajak, bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota dan pendapatan asli daerah. Dengan adanya dana desa ini memicu permasalahan yang mana masyarakat mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang memiliki SDM rendah dan belum kritisnya masyarakat perihal pengelolaan APBDesa sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi tidak maksimal (Pramayoga & Ramantha, 2020). Permasalahan lain yang rawan terjadi yaitu terkait kecurangan atau *fraud* yang dilakukan oleh oknum pengurus dana desa (Sofyani et al., 2018). Fokus peneliti dalam penelitian ini yaitu membahas tentang *fraud* pada korupsi penggunaan dana desa. Pada tahun 2022 di kabupaten Magetan, tepatnya di desa Ngariboyo ditemukan dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa. Realisasi anggaran dana desa pada tahun 2022 diduga diselewengkan hingga negara berpotensi menanggung kerugian sebesar Rp 471 juta (ketik.co.id).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengelompokkan tiga macam *fraud* yaitu *fraud* terhadap aset, *fraud* terhadap laporan keuangan dan korupsi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, *fraud* yang sering terjadi di Indonesia yaitu korupsi dan menurut hasil analisa *fraud* korupsi merupakan bentuk *fraud* yang paling merugikan karena berdampak pada kemiskinan yang terus berkelanjutan (ACFE Indonesia, 2022) didalam (Farika, 2023). Kecurangan atau *fraud* biasanya dipicu oleh sistem pengendalian yang lemah dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan (Babulu, 2020). Permasalahan mengenai *fraud* selama ini ditemukan pada sisa dana rekrutmen fasilitator, sampai dengan akuntabilitas atas pelaporan keuangan dana desa (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019) di dalam (Babulu, 2020).

Fenomena diatas menjadi alasan peneliti untuk melakukan riset ini, karena selain dibutuhkannya peran masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan keuangan dana desa, tindakan preventif juga diperlukan untuk mencegah atau meminimalisir kasus penyelewengan serupa (Dewi et al., 2019). Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan memperhatikan kompetensi dan praktek akuntabilitas sumber daya manusia serta kehadiran audit internal APIP. Audit internal APIP merupakan instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau daerah. APIP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan PP No 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Peran audit internal apip diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, bebas dari tindakan menyimpang serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga konsep good and clean governance sinergi dengan tercapainya cita-cita otonomi daerah yaitu mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat (Yanto, 2023).

Akuntabilitas merupakan hasil dari bentuk pertanggungjawaban individu yang telah diberikan kepercayaan oleh seseorang untuk memmanage pekerjaannya dalam pengelolaan suatu organisasi atau instansi pemerintah (Faizzatus Solihah et al., 2022). Indikator akuntabilitas dalam riset ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Riset sebelumnya terkait pengaruh akuntabilitas juga telah dilakukan oleh (Nur, 2023) yang memberikan bukti bahwa praktek akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparatur pemerintah desa merupakan faktor penting dan utama dalam mewujudkan keberhasilan dan kinerja individu (Mufidah & Masnun, 2021). Kompetensi ini menjadi

dasar dan keharusan yang dimiliki setiap individu baik seorang pemimpin hingga pengelola desa terkait dengan pengelolaan dana desa. Hubungan dalam kompetensi pengelola desa yaitu tingkat ukuran kompetensi seseorang berpedoman pada sebuah pemahaman (*knowledge*), kecakapan dan keterampilan yang dinilai dengan bermacam aspek teknis. Namun, yang terlihat di lapangan tepatnya beberapa desa di kecamatan Sukomoro kompetensi pengelola desa masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat sumber daya manusia (SDM) serta minimnya pengetahuan pihak aparat pemerintah desa terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Armelia & Wahyuni, 2020). Riset sebelumnya terkait pengaruh kompetensi aparat pemerintah desa juga telah dilakukan oleh (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019) yang memberikan bukti bahwa kompetensi aparat pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya yang juga di yakini berkaitan dengan pencegahan *fraud* dana desa yaitu pengawasan Audit Internal APIP. Hal ini berhubungan dengan *Agency Theory* yaitu pemerintah sebagai manajemen (agen) dan rakyat sebagai pemilik (prinsipal). Ada saatnya pemerintah akan membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu APIP hadir sebagai monitoring dalam pengelolaan keuangan dana desa. Tujuan penyaluran dana desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai bentuk implementasi komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar mencapai desa yang kuat, mandiri dan demokratis (Rahman, 2020). Oleh sebab itu, sangat penting mengetahui fungsi dana desa apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak dibutuhkan pengawasan dari Inspektorat atau APIP (Wijayanti et al., 2018). Riset sebelumnya terkait peran APIP dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa juga telah dilakukan oleh (Berliana & Purbasari, 2023) yang memberikan bukti bahwa peran APIP Inspektorat Kabupaten Ngawi dalam pencegahan kecurangan telah berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, peneliti tertarik menghadirkan APIP sebagai variabel mediasi untuk meminimalisir kasus serupa yang pernah terjadi di desa Ngariboyo tahun 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan kompetensi terhadap pencegahan *fraud* dengan menambah audit internal APIP sebagai variabel mediasi. Penelitian ini mengembangkan penelitian dari (Braen Alfon Dangeubun, 2022) yang berhasil membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas berpengaruh positif dalam mencegah segala kecurangan dalam pengelolaan dana desa di kecamatan manyeuw. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Utami et al., 2023) membuktikan bahwa kompetensi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dari kedua penelitian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan uji ulang dengan menghadirkan Audit Internal APIP sebagai variabel mediasi. Selain itu, penelitian sebelumnya belum ada ditemukan penggunaan Audit Internal APIP sebagai variabel mediasi jadi hal tersebut dikatakan relatif baru.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Utami et al., 2023) Kompetensi dan praktek akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan hasil uji yang dilakukan oleh (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019) dan (Babulu, 2020) menjelaskan bahwa akuntabilitas dan kompetensi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Melisa (2019) menghasilkan bahwa akuntabilitas, kesesuaian kompetensi dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Sedangkan penelitian jurnal internasional oleh (Rifai & Mardijuwono, 2020) memperoleh bukti empiris bahwa integritas auditor dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Witari & Putra, 2023) menjelaskan bahwa peran audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Pebedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat variabel intervening dan lokasi objek penelitian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh (Braen Alfon Dangeubun, 2022) menggunakan variabel independen Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia namun tidak menggunakan variabel intervening dengan objek penelitian di Kecamatan Manyeuw Kabupaten

Maluku Tenggara. Sedangkan penelitian ini menggunakan Audit Internal APIP sebagai variabel intervening dan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan sebagai objek penelitian. Alasan pemilihan tempat penelitian di Kecamatan Sukomoro karena belum terdapatnya penelitian atau riset yang dilakukan di Sukomoro, Magetan serta masih sedikitnya kasus korupsi yang terungkap.

Kontribusi penelitian ini diharapkan mampu menambah atau memperkaya literatur yang berkaitan dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, akan bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pemerintah desa Sukomoro untuk menerapkan praktik tata kelola keuangan yang lebih baik.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa *Agency Theory* muncul akibat adanya kontrak atau konflik antara prinsipal (produsen) dan agen, dimana pihak produsen memberikan amanah kepada agen seperti beberapa fungsi terkait planning pertumbuhan perusahaan dan pihak agen memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan perusahaan agar mencapai keuntungan atau profit yang lebih baik. Keterkaitan *agency theory* dalam riset ini dapat dilihat dari sisi pengelolaan dana desa yang mana dalam hal ini aparat pemerintah desa bertindak sebagai agen yang diberi amanah dan kepercayaan dalam mengelola dana desa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berperan sebagai pihak produsen atau prinsipal. Masyarakat disebut sebagai prinsipal karena kekuasaan tertinggi ada ditangan masyarakat, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kepala desa sebagai seorang pemimpin dilingkup pedesaan dipilih oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat (Olivia & Lastanti, 2022). Berkaitan dengan amanah tugas dari masyarakat untuk aparat pemerintah desa, maka diperlukan informasi terkait pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas, kompetensi dan pengawasan audit internal APIP dalam penelitian ini diyakini memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hubungan antara ketiga variabel tersebut dalam kaitannya dengan *agency theory* diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam meminimalisir adanya kecurangan atau *fraud*.

Akuntabilitas

Waluyo (2007) berpendapat bahwa Akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel. Dengan demikian, akuntabilitas terkait pengelolaan dana desa yaitu praktek aparat pemerintah desa dalam mengelola dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Adapun indikator akuntabilitas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 di dalam (Nur, 2023) yaitu:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Penatausahaan;
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggungjawaban.

Kompetensi

Marwansyah (2016) berpendapat bahwa Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, sikap serta karakteristik individu lainnya yang dibutuhkan untuk mewujudkan keberhasilan dalam pekerjaan. Kompetensi ini dapat diukur melalui standar yang berlaku dan telah disepakati bersama serta dapat ditingkatkan melalui proses pelatihan (training) dan pengembangan. Dengan demikian, definisi terkait kompetensi aparat pemerintah desa adalah

sebuah kemampuan yang dimiliki setiap aparatur pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola dana desa dengan baik sehingga tidak terjadi kecurangan atau *fraud*. Adapun indikator kompetensi menurut Spencer didalam [Moeheriono \(2014:5\)](#) yaitu:

1. Watak
2. Motif
3. Konsep Diri
4. Pengetahuan
5. Keterampilan

Kecurangan atau *Fraud*

[Cressey \(2015\)](#) menemukan kecurangan atau *fraud* adalah bagian dari tindakan yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum di antara pihak manajemen, pihak yang bertanggungjawab terhadap tata kelola, pihak karyawan atau pihak ketiga yang memanipulasi data atau laporan untuk mendapatkan keuntungan secara illegal. Dengan demikian, definisi pencegahan kecurangan atau *fraud* adalah tindakan pencegahan sebagai upaya meminimalisir dan membatasi ruang gerak dari pelaku *fraud*, dan mengidentifikasi setiap aktifitas yang memiliki tingkat rasio tinggi terhadap kecurangan. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan *fraud* kedalam bentuk pohon (*fraud tree*) yang terdiri dari tiga cabang yaitu, penyimpangan aset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Adapun indikator *fraud* menurut [Tuanakotta \(2007\)](#) yaitu:

1. Analisis risiko
2. Implementasi
3. Sanksi
4. Monitoring

Pengawasan Audit Internal APIP

Kegiatan pengawasan internal terhadap pengelolaan dana desa dilakukan oleh Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah atau yang sering disebut dengan istilah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). APIP ini memiliki kewenangan sebagai lembaga terdepan dari pihak internal pemerintah untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dilingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah. Adapun indikator audit internal menurut [Tugiman \(2006:53\)](#) yaitu:

1. Perencanaan dan pemeriksaan;
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi;
3. Penyampaian hasil pemeriksaan;
4. Tindak lanjut pemeriksaan.

Pengembangan Hipotesis

Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai sebuah operasional dimulai dari perencanaan, proses hingga pertanggungjawaban yang disusun dan di implementasikan oleh pemerintah daerah dan dilanjutkan oleh pihak pemerintah desa untuk memberikan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ([Santoso & Aprillianto, 2019](#)). Dengan adanya konsep akuntabilitas, diyakini mampu meminimalisir terjadinya kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh ([Aulia et al., 2023](#)) dan ([Nur, 2023](#)) mengatakan praktik akuntabilitas memberikan dampak positif terhadap pencegahan kecurangan atau *fraud*. Hal ini juga berkaitan dengan *theory Agency* yang digunakan, pihak aparatur pemerintah desa (agen) dengan amanah tugas dari masyarakat (produsen) dalam mengelola dana desa diperlukan laporan keuangan yang akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kerangka konseptual peneliti terdahulu yang diuraikan diatas maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Bepengaruhnya hubungan secara langsung antara variabel akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa

Kompetensi dinilai sebagai salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh aparatur pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Semakin kompeten seorang aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka akan mampu meminimalisir terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini mengukur kompetensi aparat pengelola dana desa dengan menghadirkan *Agency theory* melalui beberapa aspek yang dipadu dengan enam pertanyaan kunci yang menjabarkan kompetensi aparat desa dari segi kemampuan, pengetahuan, pemahaman serta pelatihan dan etika yang dipercaya memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nur, 2023); (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019); (Rahayu et al., 2019) & (Islamiyah et al., 2020) menetapkan bahwa kompetensi aparatur desa mempengaruhi pencegahan *fraud*. Berdasarkan kerangka konseptual peneliti terdahulu yang diuraikan diatas maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Bepengaruhnya hubungan secara langsung antara variabel kompetensi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa

Mengacu pada paparan-paparan pada penelitian ini, dan penulis telah menelusuri diberbagai riset literatur belum ada yang meneliti terkait hal ini. Namun, berpedoman pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Agency theory* diyakini mampu memberi pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Teori tersebut menjelaskan bahwa *fraud* dapat diminimalisir atau dihindari jika laporan keuangan bersifat akuntabel. Oleh sebab itu, penulis tertarik membuat sebuah rumusan hipotesis ketiga untuk variabel mediasi yaitu sebagai berikut:

H3 : Audit internal APIP mampu memediasi hubungan antara akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa

Mengacu pada paparan-paparan penelitian ini, dan penulis telah menelusuri diberbagai riset literatur belum ada yang meneliti terkait hal ini. Namun, penarikan hipotesis ini dilandaskan pada teori penelitian yang digunakan. *Agency theory* menjelaskan bahwa aparatur pemerintah desa berperan sebagai agen yang diberi amanah mengelolah dana desa oleh masyarakat yang berperan sebagai produsen. Amanah tersebut dapat terlaksana dengan baik jika pihak pengelolah dana desa memiliki SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat sebuah rumusan hipotesis keempat untuk variabel mediasi yaitu sebagai berikut:

H4 : Audit internal APIP mampu memediasi hubungan antara kompetensi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian dirancang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan desain penelitian untuk mengetahui apakah akuntabilitas dan kompetensi serta hadirnya pengawasan audit internal APIP dapat berkaitan dengan pencegahan *fraud* yang terjadi di Kecamatan Sukomoro.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yaitu dengan membagikan kuisisioner kepada responden secara langsung mendatangi aparatur pemerintah desa. Untuk selanjutnya, tanggapan dari responden diukur menggunakan Skala Likert 7.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenis pengambilan sampling yaitu *Probability sampling* dengan teknik simple random sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana. Bersumber pada web resmi MAGETAN SMART, kecamatan Sukomoro

terdiri dari 13 desa. Total aparaturnya pemerintah desa di 13 desa tersebut sebesar 130 orang. Adapun jumlah pengambilan sampel pada penelitian ini adalah keseluruhan jumlah populasi jadi tanpa eliminasi karena jumlah populasi <500.

Teknik Analisis Data

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data SEM PLS (*Partial Least Squares*) dengan menggunakan *software* Smart PLS 3.0 (Sihombing & Arsani, 2022). Peneliti menggunakan teknik analisis Smart PLS 3.0 karena terdapat fitur “indirect path coefficients” yang sesuai dengan parsimoni penelitian menggunakan intervening atau mediasi. Dasar pengambilan keputusan yaitu apabila nilai T-Statistic >1,96 maka hipotesis diterima, namun jika nilai T-Statistic <1,96 maka hipotesis ditolak.

Definisi Operasional

1. Variabel Akuntabilitas adalah praktek aparaturnya pemerintah desa dalam mengelolah dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.
2. Variabel Kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, sikap serta karakteristik individu lainnya yang dibutuhkan untuk mewujudkan keberhasilan dalam pekerjaan. Kompetensi aparaturnya pemerintah desa adalah sebuah kemampuan yang dimiliki setiap aparaturnya pemerintah desa dalam mengatur dan memange dana desa dengan baik sehingga tidak terjadi kecurangan atau *fraud*.
3. Variabel peran audit internal APIP adalah membantu organisasi mencapai suatu tujuan dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan kinerja aparaturnya pemerintah desa.
4. Variabel pencegahan *fraud* adalah kegiatan yang dilakukan organisasi dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang mampu membantu meminimalisir terjadinya kecurangan.

HASIL

Analisis Smart Partial Least Square 3.0

Pengujian Validitas

Convergent Validity 1st Order

Validitas konvergen (*convergent validity*) adalah nilai *factor loading* pada variable laten dengan indikator-indikatornya. *Convergent Validity* mempunyai makna sebagai seperangkat indicator yang mewakili satu variabel laten dan mendasari variabel laten yang dapat diekspresikan dengan menggunakan nilai *loadings factor* dan nilai rata-rata varian yang diekstraksi (*Average Variance Extracted / AVE*). Berikut ini adalah hasil pengujian kualitas data dengan uji *convergent validity*:

Tabel 1 Nilai Outer Loadings

Variabel	Indikator	Nilai Loading	Hasil
Pencegahan Fraud	Y1.1	0.900	Valid
	Y1.2	0.922	Valid
	Y1.3	0.842	Valid
	Y1.4	0.866	Valid
	X1.1	0.724	Valid
	X1.2	0.858	Valid
	X1.3	0.644	Valid
Akuntabilitas	X1.4	0.829	Valid

Asiyanti, Ulum dan Wicaksono
DETERMINAN PENCEGAHAN FRAUD DIMEDIASI OLEH AUDITOR INTERNAL APIP

	X1.5	0.838	Valid
	X1.6	0.839	Valid
	X1.7	0.838	Valid
	X1.8	0.873	Valid
Kompetensi	X2.1	0.808	Valid
	X2.2	0.874	Valid
	X2.3	0.816	Valid
	X2.4	0.895	Valid
	X2.5	0.921	Valid
	1.1	0.911	Valid
	1.2	0.935	Valid
	1.3	0.934	Valid
1-Audit Internal apip	1.4	0.860	Valid
	1.5	0.844	Valid

Sumber: Output Smart PLS 3.0.

Berdasarkan hasil analisis model pengukuran dapat diketahui bahwa semua indikator yang mengukur variable pencegahan fraud, akuntabilitas, kompetensi dan audit internal APIP memiliki nilai *loading factor* yang lebih besar dari 0.5. Dengan demikian indikator-indikator yang mengukur dimensi atau variable tersebut dinyatakan valid (Priyatno:2014).

Convergent Validity selain dapat dilihat melalui *loading factor*, juga dapat diketahui melalui *Average Variance Extracted (AVE)*. Suatu instrumen dinyatakan memenuhi pengujian validitas konvergen apabila memiliki *Average Variance Extracted (AVE)* diatas 0.5 (Israwati et al., 2023), (Osborn & White, 2018), (Zulhafih et al., 2022), (Pratiwi & Muakki, 2021). Hasil pengujian *Convergent Validity* disajikan dalam table berikut :

Tabel 2 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE	Keterangan
Pencegahan Fraud	0.654	Valid
Akuntabilitas	0.753	Valid
Kompetensi	0.779	Valid
1-Audit Internal APIP	0.806	Valid

Sumber: Output Smart PLS 3.0.

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa variable pencegahan *fraud*, akuntabilitas, kompetensi, audit internal APIP menghasilkan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* yang lebih besar dari 0.5 (Priyatno:2014). Dengan demikian indikator yang mengukur variable tersebut dinyatakan valid.

Pengujian Reliabilitas

Perhitungan yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas konstruk adalah *cronbach alpha*. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila *cronbach alpha* bernilai lebih besar dari 0.6 maka konstruk tersebut dinyatakan reliabel (Priyatno:2014). Hasil perhitungan *cronbach alpha* dapat dilihat melalui ringkasan yang disajikan dalam table berikut :

Tabel 3 Nilai Cronbach Alpha

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
X1-Akuntabilitas	0.924	Reliabel
X2-Kompetensi	0.934	Reliabel
Y1-Pencegahan Fraud	0.907	Reliabel

1-Audit Internal APIP

0.940

Reliabel

Sumber: Output Smart PLS 3.0.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variable pencegahan fraud,akuntabilitas,kompetensi dan audit internal APIP bernilai lebih besar dari 0.6. Berdasarkan perhitungan *Cronbach's Alpha* semua indicator yang mengukur dimensi atau variable tersebut dinyatakan reliabel (Priyatno:2014), (Yadewani & Nasrul, 2019); (Putri et al., 2020); (Suhendri et al., 2023).

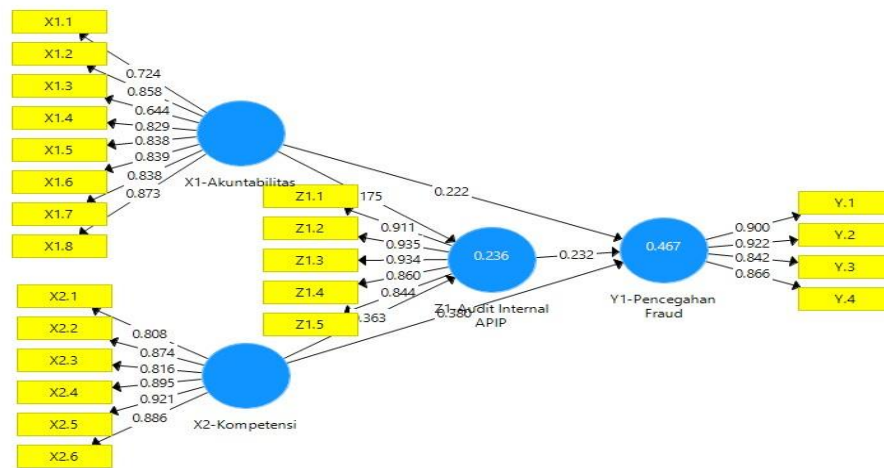
Goodness of Inner Model

Pengujian Hipotesis

Goodness of Inner Model digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel endogen untuk menjelaskan keragaman variable eksogen, Hasil *Goodness of Inner Model* yang ditunjukkan melalui *R-Squares* dapat di tunjukkan pada table dibawah ini:

R-square (R²)

R-square digunakan untuk mengukur tingkat perubahan variable independen terhadap variable dependen,



Tabel Inner dan Outer Model

Sumber: Output Smart PLS 3.0.

Tabel 4
Nilai R-square

Variabel	R- square	R- squareadjusted
Y1-Pencegahan Fraud	0.467	0.449
1-Audit Internal APIP	0.236	0.219

Sumber: Output Smart PLS 3.0.

Berdasarkan pada gambar 1 dan table 4. 5 maka nilai *R-square* sebesar 0,467 dapat disimpulkan bahwa variable pencegahan fraud (Y1) dapat dijelaskan oleh variable akuntabilitas,kompetensi dan audit internal APIP sebesar 46,7%, Sedangkan sisanya sebesar 54,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, nilai *R-square* sebesar 0,236 dapat disimpulkan bahwa variable audit internal APIP (1) dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas dan kompetensi sebesar 23,6%, Sedangkan sisanya sebesar 77,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Analisis Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menentukan kausalitas yang dikembangkan dalam model yaitu pengaruh variable eksogen terhadap variable endogen, Pengujian signifikansi dapat diketahui melalui T-statistik lebih besar dari nilai kritis (t-tabel = 1,96) pada table dibawah ini:

Path Coefficients

Pengujian *path coefficients* ini digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen, Pengujian ini dapat dilihat dari nilai p-values, Apabila nilai p-values <0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antar variable tersebut, Pengujian signifikansi dapat diketahui melalui T-statistik lebih besar dari nilai kritis (t-tabel 1,96).

Dengan menggunakan PLS (*partial least square*) versi 3 dan dengan perhitungan *Boot strapping* untuk menguji hipotesis, maka diperoleh nilai-nilai sebagai berikut :

Eksogen	Path Coefficients	T- Statistics	P- Value
X1-Akuntabilitas -> Y1-Pencegahan Fraud	0.222	1.807	0.071
X2-Kompetensi -> Y1-Pencegahan Fraud	0.380	*3.206	*0.001
X1-Akuntabilitas -> 1-Audit Internal APIP -> Y1-Pencegahan Fraud	0.041	1.278	0.202
X2-Kompetensi -> 1-Audit Internal APIP -> Y1-Pencegahan Fraud	0.084	*2.009	*0.045

Keterangan :

- X1 : Akuntabilitas
- X2 : Kompetensi
- 1 : Audit Internal APIP
- Y1 : Pencegahan *Fraud*

PEMBAHASAN

Berpengaruhnya hubungan secara langsung antara variabel akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa

Pada hasil pengujian yang tertera pada tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai T-statistik akuntabilitas terhadap pencegahan fraud adalah 1.807. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistik < 1.96. Hasil dari P-Value dikatakan signifikan apabila memiliki nilai kurang dari 0,05 sedangkan variable akuntabilitas terhadap pencegahan fraud terhadap pencegahan fraud menunjukkan nilai 0,071. Hal ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Sehingga hipotesis 1 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Utami et al., 2023) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Berpengaruhnya hubungan secara langsung antara variabel kompetensi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa

Pada hasil pengujian yang tertera pada tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai T-statistik kompetensi terhadap pencegahan fraud adalah 3.206. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistik > 1.96. Hasil dari P-Value dikatakan signifikan apabila memiliki nilai lebih dari 0,05 sedangkan variable kompetensi terhadap pencegahan fraud menunjukkan nilai 0,001. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Sehingga hipotesis 2

diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019) dan (Widyawati et al., 2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Pengawasan audit internal APIP mampu memediasi hubungan antara akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa

Pada hasil pengujian yang tertera pada tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai T-statistik akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dimediasi oleh audit internal APIP adalah 1.278. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistik < 1.96. Hasil dari P-Value dikatakan signifikan apabila memiliki nilai kurang dari 0,05 sedangkan variable akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dimediasi oleh audit internal APIP menunjukkan nilai 0,202. Sehingga dapat disimpulkan bahwa audit internal APIP tidak memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud*. Sehingga hipotesis 3 ditolak. Hal ini disebabkan aparatur desa yang meyakini bahwa praktek akuntabilitas tidak berpengaruh dalam pencegahan kecurangan. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini bertentangan dengan *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa laporan keuangan yang akuntabel dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

Pengawasan audit internal APIP mampu memediasi hubungan antara kompetensi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa

Pada hasil pengujian yang tertera pada tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai T-statistik kompetensi terhadap pencegahan *fraud* dimediasi oleh audit internal APIP adalah 2.009. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistik < 1.96. Hasil dari P-Value dikatakan signifikan apabila memiliki nilai kurang dari 0,05 sedangkan variable kompetensi terhadap pencegahan *fraud* dimediasi oleh audit internal APIP menunjukkan nilai 0,045. **Hal ini dapat disimpulkan bahwa audit internal APIP mampu memediasi pengaruh kompetensi terhadap pencegahan *fraud*.** Sehingga hipotesis 4 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan *Agency Teory Jensen dan Meckling (1976)* yang menjelaskan bahwa aparatur desa berperan sebagai agen yang diberi amanah dalam mengelola dana desa, berkaitan dengan amanah tersebut, maka diperlukan aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam hal membuat laporan keuangan dana desa yang berkualitas dan kehadiran audit internal memperkuat aparatur desa untuk melatih keahlian dalam mengelola keuangan dana desa.

KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa praktek akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin rendah atau tinggi praktek akuntabilitas yang dimiliki aparatur desa tidak mempengaruhi tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi aparatur desa dan pengawasan Audit Internal APIP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi aparatur desa dan pengawasan APIP maka semakin tinggi juga pencegahan *fraud* yang dapat dilakukan dalam pengelolaan dana desa.

SARAN

1. Saran Praktis : Setelah penulis meneliti dan memaparkan pembahasan mengenai determinan pencegahan *fraud* dimediasi oleh peran auditor APIP pada aparatur pemerintah desa di Kecamatan Sukomoro, maka peneliti memberikan saran, untuk meminimalisir terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukomoro, maka perlu dilakukan sosialisasi oleh ahli bidang akuntansi agar dapat mengolah dana desa serta membuat laporan keuangan dengan baik.
2. Saran Teoritis : Penelitian mengenai determinan pencegahan *fraud* dimediasi oleh peran auditor APIP pada aparatur pemerintah desa di Kecamatan Sukomoro disarankan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama dengan menambahkan pihak audit

internal APIP sebagai sampel atau responden agar dapat melihat kualitas laporan keuangan desa dari pandangan audit internal APIP.

REFERENCE

- Adi Kurniawan Saputra, K., Dian Pradnyanitasari, P., & Made Intan Prihandani dan Gst B Ngr P Putra, N. I. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>
- Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner*, 7(3), 2112–2120. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1462>
- Babulu, N. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud The Effect Factor of Accountability in Village Management Fund and the Impact on Fraud Prevention. *Juni*, 5(2), 18–26. <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP18>
- Berliana, N., & Purbasari, H. (2023). Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 398–406. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1535>
- Braen Alfon Dangeubun, Y. . W. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan* 3(November), 35–49. <http://eprints.umpo.ac.id/8681/>
- Cressey, D. (1953). Other people’s money, dalam: “Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*. Vol. 13 h. 53-81
- Cut Fitrika Syawalina, Susanti, E., & Nadya, C. (2022). Pengaruh Pengawasan Inspektorat Daerah dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(3), 143–151. <https://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/ilman>
- Dewi, N. L. P. I. T., Anggariyani, M. P., Septyastini, I. D. A. E., Gayatri, N. M. S., Sudiari, K. D., & Andika, K. D. (2019). FRAUD TRIANGLE DI SEKTOR PEMERINTAHAN (Studi Kasus Pada Dinas Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(2), 157–162. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i2.19877>
- Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, & Adhitya Bayu Suryantara. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 136–154. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191>
- Farika, N. C. (2023). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENCEGAH FRAUD PADA BUMDESMA SENDANG. *Journal of Engineering Research*, 11(1), 73–82.
- Herawati, N. L. M., Suputra, I. D. G. D., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pengawasan Pimpinan, Disiplin dan Kompetensi Pegawai pada Kinerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(7), 1953–1980. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/14871>

- Indriani, A. (2022). Peran Pencegahan Fraud Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Financial and Tax*, 1(2), 70–85. <https://doi.org/10.52421/fintax.v1i2.169>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Israwati, Hermansyah, T. Irawan, Fajrig Arsyelan, & Avid Opel Alexander. (2023). Penerapan Strategi Pemasaran, Inovasi Produk Kreatif Dan Orientasi Pasar Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Umkm Tekat Tiga Dara. *Jurnal Pengabdian Ibnu Sina*, 2(1), 72–76. <https://doi.org/10.36352/jpis.v2i1.510>
- Jensen and Meckling. 1976. Theory of The Firm : Management Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. V.3, No. 4, pp. 305-360.
- Marwansyah. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Dua. Cetakan keempat. Bandung: Alfabeta,CV
- Melisa. (2019). PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN CENDANA KABUPATEN ENREKANG. Unismuh
- Moehersono, 2014, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mufidah, M., & Masnun, M. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 519. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.408>
- Nur, A. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kompetensi Manajerial, Dan Akuntabilitas, Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Di Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 3(1), 190–205. <https://doi.org/10.47233/jeps.v3i1.669>
- Olivia, & Lastanti, H. S. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Independensi, Whistleblowing System, Anti-Fraud Awareness, Dan Integritas Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 261–272. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14217>
- Osborn, K., & White, B. L. (2018). Analisis Faktor Optimalisasi Golden Age Anak Usia. *Journal Industrial Servicess*, 4(1), 48–56.
- Pramayoga, I. B., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 226–237.
- Pratiwi, A. R., & Muakki, M. (2021). Perceived Organizational Support Terhadap Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 22(1), 111–120. <https://doi.org/10.30596/jimb.v22i1.5282>
- Putri, V. D., Affandi, M. I., & Nikmatullah, D. (2020). Analisis Kepuasan Konsumen Dan Bauran Pemasaran Pada Agroindustri Kopi Bubuk Cap Jempol Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 8(1), 132. <https://doi.org/10.23960/jia.v8i1.4346>
- Rahayu, D., Rahmayati, A., & Narulitasari, D. (2019). Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Among Makarti*, 11(2), 97–107. <https://doi.org/10.52353/ama.v11i2.170>
- Rahman, K. G. (2020). Sistem Pengendalian Internal Dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, Vol. 3(No. 1), Hal. 20-27.
- Rifai, M. H., & Mardijuwono, A. W. (2020). Relationship between auditor integrity and organizational commitment to fraud prevention. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(2), 315–325. <https://doi.org/10.1108/AJAR-02-2020-0011>

- Santoso, B., & Aprillianto, B. (2019). The Needs and Readiness Analysis of Social Audit Implementation in Indonesia. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(1), 35. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i1.3399>
- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2022). *Aplikasi SmartPLS untuk Statistisi Pemula* (Issue March).
- Sofyani, H., Suryanto, R., Arie Wibowo, S., & Widiastuti, H. (2018). Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jati.010101>
- Suhendri, H., Hardianto, W. T., Handayanto, A. J., & Tena, P. D. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 16–24. <https://doi.org/10.33366/ref.v11i2.5002>
- Tuanakotta, T. M. 2007. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI)
- Tugiman, Hiro. 2006. Standar profesional audit internal. Yogyakarta : Kanisius.
- Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, & Satira Yusuf. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *CBJIS : Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Utami, N. W. D., Kristiantari, I. D. A., & Miati, N. L. P. M. (2023). Pengaruh Kompetensi , Praktek Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(1), 20–25.
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Cetakan 1. Bandung: Mandar Maju.
- Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 368–379.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud Di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>
- Witari, N. L. P. S., & Putra, C. G. B. (2023). Pengaruh Audit Internal, Whistleblowing System, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(April), 237–247. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/3951>
- Yadewani, D., & Nasrul, H. W. (2019). Pengaruh Kompensasi dan Pelatihan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. BPR Prima Raga Sejahtera Padang. *Dimensi*, 8(3), 573–588.
- Yanto, A. F. F. (2023). *DETERMINANTS OF FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING IN MINING COMPANIES : PENTAGON THEORY FRAUD JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 7(1), 843–859.
- Zulhafih, Z ., Permatasari, S., & Hermendra, H. (2022). Berdaya Nalar Efektif: Tindakan Progresif Belajar Secara Daring Akibat Pandemi Covid 19. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2505–2514. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2397>